

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS UNIT KEUANGAN MIKRO UPK
KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR)**

**THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN COMMUNITY
ECONOMIC EMPOWERMENT (CASE STUDY OF UPK MICROFINANCE
UNIT NANGAPANDA SUB-DISTRICT EAST END NUSA TIMUR)**



OLEH:

HAZLINDA

21412A0205

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI KASUS UNIT KEUANGAN MIKRO UPK KECAMATAN
NANGAPANDA KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR)**

**THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN COMMUNITY
ECONOMIC EMPOWERMENT (CASE STUDY OF UPK MICROFINANCE
UNIT NANGAPANDA SUB-DISTRICT EAST END NUSA TIMUR)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
pada program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

HAZLINDA
21412A0205

**KOSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI KASUS UNIT KEUANGAN MIKRO UPK KECAMATAN
NANGAPANDA KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR)

Telah memenuhi syarat dan di setujui
Tanggal, 12-02-2019

Dosen pembimbing I



Drs. Amil,MM
NIDN: 0831126204

Dosen pembimbing II



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN: 0828108404

Menyetujui:

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Ketua Program Studi



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN.0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDI KASUS UNIT KEUANGAN MIKRO UPK KECAMATAN
NANGAPANDA KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR)

OLEH:

HAZLINDA
21412A0205

Pada Tanggal, 18 Februari 2019
Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Tim Penguji

1. Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204


penguji Utama

2. Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN.0828108404


Penguji Pendamping

3. Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak
NIDN.0807058301


Penguji Netral

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Hazlinda
Nim : 21412A0205
Alamat : Jln. Gajah Mada, Gang Citra Warga VI

Memang benar skripsi yang berjudul *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Unit Keuangan Mikro Upk Kelurahan Ndururea Kecamatan Nangapanda)* adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar serjana ditempat manapun.

Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan bimbingan. Jika terdapat karya orang lain dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Januari 2019
Yang membuat pernyataan



Hazlinda
21412A0205



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAZLINDA
NIM : 21412A0205
Tempat/Tgl Lahir : WARUKASU, 14 APRIL 1995
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS
Fakultas : FISI.POL
No. Hp/Email : 082 840 137 567
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBEBAYAN MASYARAKAT (STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UPK KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE NTT)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17-02-2020



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

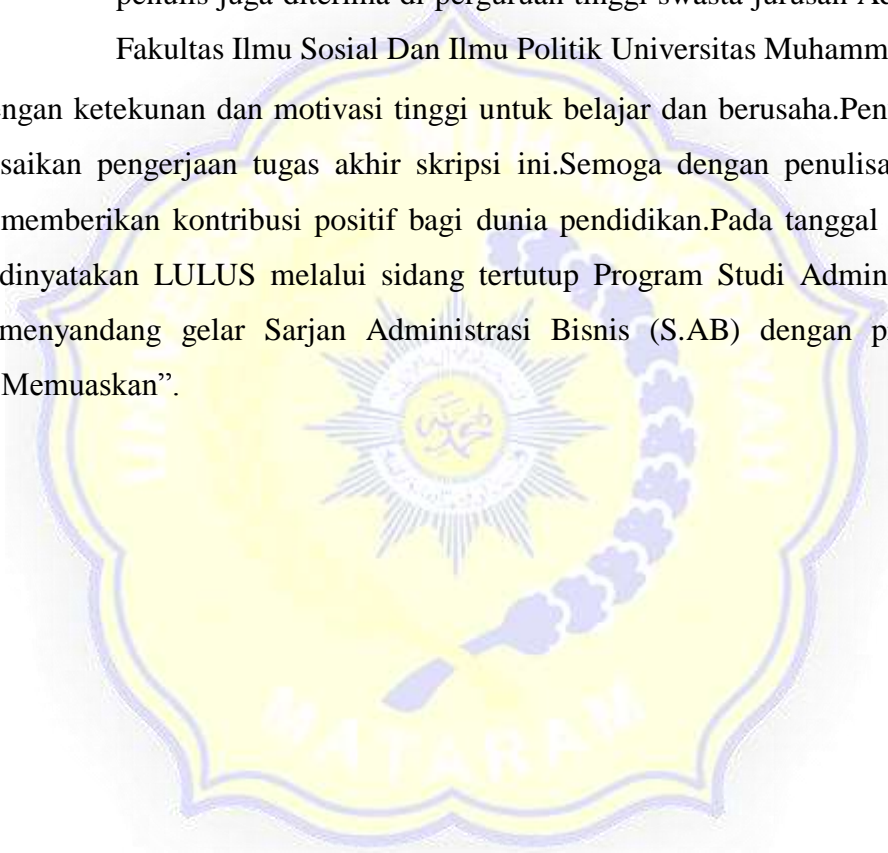
Iskandar, S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



HAZLINDA, lahir di Warukasu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende NTT, pada tanggal 14 April 1995. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Saaban Hamid dan Siti Djahari. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Dharmawanita Nangapanda selama setahun dan di lanjutkan di SDI Nangapanda 2 lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan studi ke SMPN 1 Nangapanda dan lulus pada tahun 2011, pada tahun itu penulis juga melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Nangapanda dan lulus pada tahun 2014 kemudian pada tahun yang sama penulis juga diterima di perguruan tinggi swasta jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Pada tanggal 18 Februari 2019 penulis dinyatakan LULUS melalui sidang tertutup Program Studi Administrasi Bisnis dan berhak menyandang gelar Sarjan Administrasi Bisnis (S.AB) dengan predikat kelulusan “Sangat Memuaskan”.



MOTTO

“Mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa, selalu ada harapan bagi orang yang berdo’a dan selalu ada jalan bagi orang berusaha”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban rasullullah muhammad saw.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku sayangi:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Saaban Hamid Dan Ibu Siti Djahari), sebagai tanda bukti dan rasa terima kasih yang telah memberikan kasih sayang, dan segala dukungan yang tiada habis-habisnya.
2. Bapak Drs. Amil, MM dan Bapak Lalu Hendra Maniza. S. Sos.,MM selaku dosen pembimbing, terima kasih yang tak terhingga atas nasihat dan waktu yang diluangkan untuk membimbing saya selama proses konsultasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Untuk adik-adiku (Pandji, Nurhaliza dan Fajar) terima kasih untuk do'a dan dukungan semangatnya.
4. Keluarga besarku (Bapak Abdul Haris Pua A. dan Ibu Haryani, kakak Latifa Halim, Muhamad saleh Halim, kakak Said) dan semua yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu terima kasih yang telah mendukung dalam proses studiku.
5. Sahabat seperjuanganku (Nurhalifa, Raodah, Ayu anggriningsih, Sumiati, dan semuanya) terima kasih untuk semangat, bantuan, dukungan dan canda tawa kalian semua, dan terima kasih untuk kenangan manis selama masa perkuliahan.
6. Buat teman-teman (Chairil Sanggu, Dzuhri Amalia, Hasna Usman, S.Pd, Tuti Alawiah, dan semua yang sudah turut berperan dalam penyusunan skripsi ini) terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungan kalian.
7. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang serta kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Unit Keuangan Mikro Kecamatan Nangpanda Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan proposal ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali.,MSi selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza,S.Sos.,MM selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Bisnis sekaligus dosen pembimbing II.
4. Bapak Drs. Amil,MM selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni ,S.E.,M.Ak selaku dosen penguji skripsi (Dosen penetral).
6. Orang tua tercinta serta keluarga yang telah memberikan luapan kasih sayang, doa, bimbingan,dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat semua pihak yang juga turut memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembang dunia pendidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan penelitian	6
1.3.2. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro	11
2.2.2. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Mikro	12
2.2.3. Peran Lembaga Keuangan Mikro	13
2.2.4. Peran Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14
2.2.5. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Intermediasi Keuangan	16
2.2.6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17

2.2.7. Strategi Pemberdayaan	19
2.2.8. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan	19
2.2.8.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	21
2.2.9. Lembaga Keuangan Mikro dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMK di Pedesaan	22
2.2.10. Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdapat Di Indonesia Saat Ini	24
2.2.11. Membangun Lembaga Keuangan Mikro yang Sehat dan Kuat	25
2.2.12. Masyarakat	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3. Data dan Sumber Data	28
3.3.1. Data Primer	28
3.3.2. Data Sekunder	29
3.4. Tekni Pengumpulan Data	29
3.4.1. Observasi	30
3.4.2. Wawancara	30
3.4.3. Dokumentasi.....	31
3.5. Tahap Analisis Data	31
3.5.1. Reduksi data (<i>data reduction</i>)	31
3.5.2. Penyajian data (<i>data display</i>)	32
3.5.3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (<i>conclusion drawing and verification</i>)	32
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Penelitian.....	33
4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda.....	33
4.1.1.1. Letak Administratif dan Topografi Kelurahan Ndorurea	

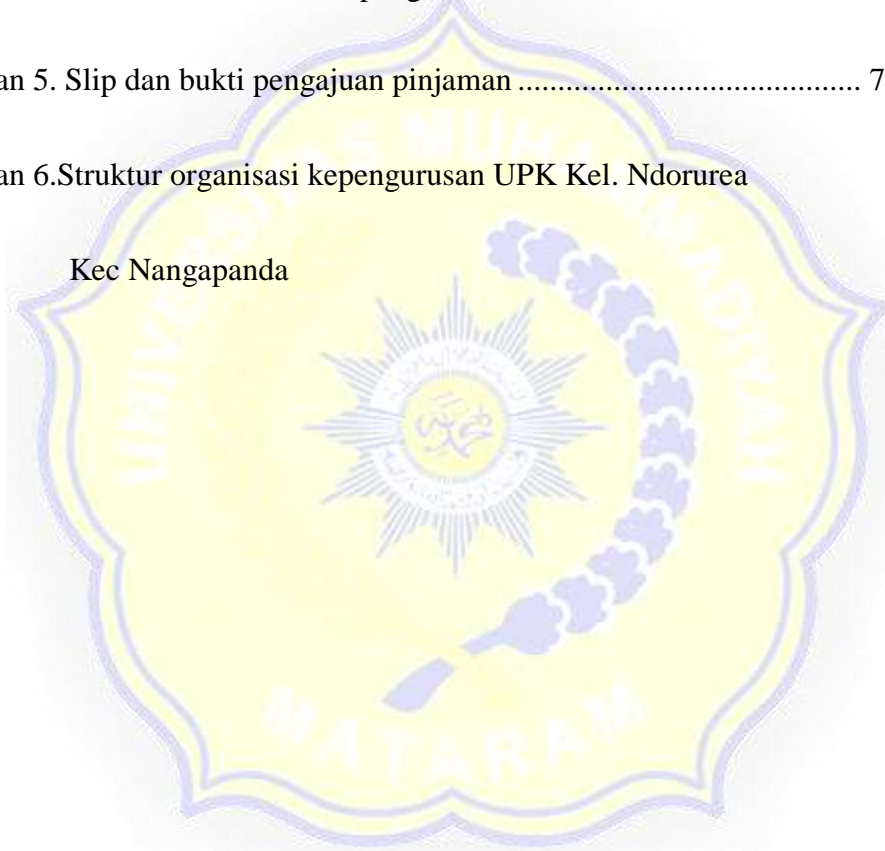
Kecamatan Nangapanda.....	33
4.1.1.2. Penduduk.....	34
4.1.1.3. Keadaan Ekonomi	34
4.1.2. Gambaran Umum Unit Keuangan Mikro Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda.....	35
4.1.3. Visi Dan Misi Lembaga Keuangan Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda	36
4.1.3.1.Visi Lembaga Keuangan UPK kelurahan Ndorurea kecamatan Nangapanda	36
4.1.3.2.Misi Lembaga Keuangan UPK kelurahan Ndorurea kecamatan Nangapanda	36
4.1.4. Tugas pokok struktur organisasi kepengurusan Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda	37
4.1.5. Produk-produk pembiayaan UPK Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda.....	41
4.1.6. Gambaran Umum Informan	42
4.1.7. Hasil dan Pembahasan	44
4.1.8. Deskripsi Data.....	45
4.1.8.1.Bentuk Peran Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45
4.1.8.2.Dampak Peran UPK Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	49
4.1.8.3.Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Peran Lembaga Keuangan Mikro UPK Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi masyarakat.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat permohonan izin wawancara	60
Lampiran 2. Hasil wawancara informan	61
Lampiran 3. Daftar nama Informan	70
Lampiran 4. Dokumentasi aktivitas pengambilan data.....	72
Lampiran 5. Slip dan bukti pengajuan pinjaman	75
Lampiran 6. Struktur organisasi kepengurusan UPK Kel. Ndorurea	

Kec Nangapanda



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 4.1 Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kel. Ndorurea Kecamatan Nangapanda	46
Table 4.2 Anggaran yang disalurkan dan tingkat pengembalian UEP pada UPK kel.Ndorurea kec. Nangapanda tahun 2017-29 juni 2018	47
Tabel 4.3 Perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada 2017- 29 juni 2018	48
Table 4.4. Data Tunggal Pinjaman UEP Tahun 2017 – 2018	53



Hazlinda2020. **“Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*studi kasus unit keuangan mikro upk kecamatan nangapanda kabupaten ende nusa tenggara timur*)”**

Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal. Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa persepsi anggota terhadap keberadaan dan peran Lembaga Keuangan Mikro terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan terutama disebabkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, dan peningkatan motivasi bekerja, Otonomi daerah semakin membuka peluang mendorong peningkatan kegiatan perekonomian daerah, terutama di daerah Kelurahan Ndururea Kecamatan Nangapanda, yang selama ini mengalami ketinggalan dibanding daerah di Jawa. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, melalui berbagai produk yang ditawarkannya. Hal ini tentunya juga akan mendorong perekonomian daerah.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro, Pembiayaan usaha, pendapatan

Hazlinda 2020. "The Role of Microfinance Institutions in Community Economic Empowerment (A case study of the microfinance unit UPK, Nangapanda sub-district, Ende East Nusa Tenggara District)"
Thesis. Mataram. Muhammadiyah University of Mataram.

ABSTRACT

Microfinance Institutions are financial institutions that provide financial services to small and micro-entrepreneurs and low-income people who are not served by formal financial institutions. Many types of microfinance institutions that grow and develop in Indonesia indicate that microfinance institutions are needed by the community, especially low-income people, small and micro-entrepreneurs who have so far not reached by banking financial services, especially commercial banks. Based on the results, it can be explained that the members' perceptions toward the existence and the role of Microfinance Institutions in increasing people's income in reducing poverty are mainly due to social activities, educational activities, and activities that increase work motivation. Regional autonomy opens up opportunities to boost the economic activity of the regions, especially in the Ndururea Village, Nangapanda District, which have been left behind compared to Java. It is hoped that Microfinance Institutions will increase the income of the region concerned through various products it offers. This Microfinance institution will also boost the regional economy.

Keywords: Micro Finance Institutions, Business Financing, Income



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang ditandai dengan ragam tawaran konsep ekonomi. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan perubahan kondisi ekonomi global yang mewarnai perubahan ekonomi di tanah air. Perubahan ekonomi diperparah dengan Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 telah merusak tatanan ekonomi yang merupakan hasil dari pembangunan nasional. Parahnya, krisis tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasilitas pokok, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana prasarana transportasi dan lain sebagainya. Kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low-level of security*), dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*) (Rusdarti dan Sebayang, 2013: 1).

Setali tiga uang, kondisi perekonomian Indonesia pada masa itu diperparah eskalasi politik negara yang tidak stabil, sehingga berdampak munculnya krisis sosial yang cukup parah kerusuhan terjadi di beberapa tempat, penjarahan menjamur dan tindakan-tindakan anarkis lainnya pun seolah menular ke berbagai sektor. Dahsyatnya krisis moneter pada saat itu memporak-porandakan beberapa sektor perekonomian terutama sektor perbankan dan bursa saham. Di sisi lain terdapat sektor ekonomi yang ikut terkena imbas krisis moneter, yakni sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Pada saat krisis moneter bukan berarti menghilangkan sektor

usaha mikro kecil dan menengah tidak menghadapi permasalahan. Usaha Mikro, kecil dan menengah inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang. Usaha mikro kecil dan menengah terjadi adanya dukungan Lembaga Keuangan Mikro.

Pada saat ini, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak sebagai lumbung-lumbung aktivitas usaha. Hal ini diperkuat dengan pergeseran cara pandang sebagian masyarakat pasca terjadi krisis moneter, banyak kalangan semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan bahkan menjalankan kedua fungsi tersebut (*employe dan entrepreneurs*). Motor penggerak lumbung-lumbung aktivitas usaha dikalangan masyarakat pada umumnya didukung oleh Lembaga Keuangan Mikro sehingga posisi Lembaga Keuangan Mikro mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah, perkembangan Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya bersifat konvensional bahkan sudah ada kolaborasi lembaga keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji (Mubarok, 2015: 110).

Dalam perkembangannya, Lembaga Keuangan Mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang

umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Oleh karena begitu pentingnya keberadaan Lembaga Keuangan Mikro bagi UKM, maka jumlah Lembaga Keuangan Mikro dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat, baik jumlah unitnya maupun jumlah nasabahnya di seluruh wilayah Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga berperan dalam perekonomian nasional yang sangat penting, karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih bisa bertahan di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Menurut keputusan presiden RI 19 Tahun 1998. Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat.

Menurut UU Nomor. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang. Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Secara garis besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan menjadi empat jenis UMKM yaitu: Usaha perdagangan, Usaha pertanian, Usaha industri, Usaha jasa.

Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara resiko mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dianggap cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan. Disisi pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di Lembaga Keuangan Mikro. Optimalisasi tersebut bisa diawali dari sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dapat diketahui dan dinikmati

kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing dilingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya. Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan Lembaga Keuangan Mikro yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan Lembaga Keuangan Mikro, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Secara garis besar Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu Formal, Semi formal, dan Non formal. Yang dimaksud formal yaitu yang di atur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia, dari yang formal ini adalah divisi keuangan mikro bank besar, seperti: BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin, BPR, koperasi kredit, koperasi simpan pinjam. Semi formal merupakan lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya di atur oleh regulator perbankan, tetapi pengawasannya dilakukan secara mandiri atau diluar dari regulator perbankan. Misalnya dari lembaga keuangan semi formal dapat berupa perum pegadaian. Sedangkan Non formal. Dari lembaga non formal contohnya,

asrisan, ijon. Lembaga ini sangat penting pengaruhnya terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan menengah ke bawah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana partisipasi dari pihak Lembaga Keuangan Mikro dalam menyetarakan perekonomian masyarakat dalam hal“**Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Unit Keuangan Mikro UPK Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitan ini adalah :

1. Bagaimana Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam pengentasan kemiskinan?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi peran Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) dalam supaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

1.3.2 Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

1. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan untuk pengembangan atau penyaluran modal program pinjaman kepada masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Bagi Fasilitator kecamatan dapat dijadikan sebagai masukan dalam memaksimalkan pengelolaan pemberian pinjaman modal.
- c. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya peran lembaga keuangan dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Nangapanda, mengenai manfaat adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah upaya meningkatkan pendapatan ekonomi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaa	Perbedaan
1	Ashari(2006)	Petensi lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan kebijakan pengembangan	Pembangunan perekonomian pedesaan masih menghadapi kendala terbatasnya modal para pelaku usahanya	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu membahas tentang potensi LKM sedangkan penelitian ini lebih fokus tentang peran Lembaga Keuangan Mikro
2	I Gde Kajeng Baskar (2014)	Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia	Struktur masyarakat Indonesia yang amat heterogen membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing masing kelompok.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap lembaga keuangan secara umum.
3	Wiloejo Wiryo Wijono	Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit	Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengentasan kemiskinan.	Jika pada penelitian Wiloejo Wiryo Wijono meneliti tentang pemberdayaan

		Memutus Mata Rantai Kemiskinan.	lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).		lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional dalam pengentasan kemiskinan sedangkan penelitian yang sekarang tentang peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi.
4	Widya gina dan jaenal affendi (2014)	menganalisis program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro di BMT Baituk Karim Bekasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang secara positif signifikan mempengaruhi pendapatan adalah pembiayaan yang diambil responden, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, pendidikan, dan variabel etika dan moral. Variabel yang secara positif dan signifikan mempengaruhi kesejahteraan yaitu lamanya menjadi	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang lembaga keuangan mikro tapi penelitian ini lebih fokus ke sistem syariah	Penelitian sekarang meneliti tentang peran lembaga keuangan mikro terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penelitiannya dilakukan di Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Baituk Karim Bekasi.

			anggota, pengeluaran makan, pendapatan rata-rata, dan pembiayaan yang diambil responden.		
5	Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016)	Menganalisis peran pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sektor mikro pedagang pasar tradisional.	Hasilnya menunjukkan bahwa Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.	Terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, tapi penelitian ini lebih mengarah ke sistem syariah	Penelitian yang sekarang membahas tentang peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

*Sumber:*Jurnal Aplikasi Manajemen(JAM) Vol 13 No 4 Desember 2015

Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 201

Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208, Juli 2016

Jurnal Analisis kebijakan pertanian ,Vol. 4 No. 2, Hal: 146-164, juni 2006

Berdasarkan hasil dari lima kajian penelitian terdahulu diatas yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini adalah bagian pertama penelitian dari Ashari (2006) dimana penelitiannya tentang petensi lembaga keuangan mikro dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan kebijakan pengembangan, yang sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi, pada penelitian ini peneliti lebih memfokus pada peran lembaga keuangan mikro. Maka dari itu, kedua penelitian ini saling memiliki keterkaitan yang erat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Undang – undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* (MFI) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Menurut Mandala manurung dan prathama rahardja (2004: 124) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil dan mikro. Bagaimanapun, target atau segmen *micro finance* senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Banyaknya jenis Lembaga Keuangan Mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

Pada Lembaga Keuangan Mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan. Pada akhirnya peran Lembaga Keuangan Mikro dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi, dan menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

2.2.2 Konsep Dasar Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. Lembaga Keuangan Mikro secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi masyarakat pada umumnya. Sedangkan secara khusus Lembaga Keuangan Mikro bertujuan (Rehil giberd 2016: 25):

1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro sebagai bagian dari pelaku ekonomi Negara ini.
2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.

3. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Adapun Lembaga Keuangan Mikro yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Sehingga secara konsepsi Lembaga Keuangan Mikro adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu: kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, dan sodaqoh serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan, dan kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Jenita (2017)

2.2.3 Peran Lembaga Keuangan Mikro

Bahasan tentang perekonomian pedesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Pemberdayaan usaha kecil dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran usaha kecil yang strategis baik dilihat dari kualitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. (Bank Indonesia dalam Ashari, 2006) mencatat beberapa peranan strategis dari usaha kecil tersebut, diantaranya:

1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.
2. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibanding investasi yang sama pada usaha menengah/besar.
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

2.2.4 Peran Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, dalam arti memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengambil keputusan terkait dengan aspek kehidupan mereka. Adapun kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi keputusan dan pilihan mereka.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai sebuah strategi pembangunan sudah semakin diterima oleh masyarakat *maupun* pemerintah, bahkan konsep ini telah berkembang sebagai pemikiran ilmiah dengan berbagai konsep dan teori sesuai latar belakang keilmuan para pemikir yang mendiskusikan konsep tersebut.

Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, melalui pembangunan Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini membutuhkan suatu konsep ideal tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro, langkah ini dinilai sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi mikro berbasis kerakyatan karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah.

Jadi, peran Lembaga Keuangan Mikro didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan masyarakat khususnya kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktifitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidup dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, era otonomi daerah merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peningkatan Lembaga Keuangan Masyarakat, mendorong kebangkitan ekonomi rakyat (sekaligus ekonomi nasional) maupun pengurangan kemiskinan, yang akan dilakukan oleh rakyat sendiri. Masyarakat yang mandiri akan menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang dimiliki.

2.2.5 Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Intermediasi Keuangan

Dalam aktivitas perekonomian, lembaga keuangan memegang peran strategis sebagai intermediasor keuangan, dimana lembaga keuangan menghimpun dana dari unit surplus baik rumah tangga, sektor usaha, maupun pemerintahan, dan kemudian disalurkan kepada pelaku ekonomi yang mengalami defisit dana. Dengan kata lain intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dan dari unit surplus dana (*ultimate lenders*) kepada unit defisit dana (*ultimate borrowers*).

Selanjutnya jika dilihat dari aktivitas lembaga keuangan sebagai intermediasor keuangan, maka peran lembaga keuangan dalam perekonomian adalah sebagai berikut: (Fandrial dinal: 2016. (<http://pengertiandefenisi.blogspot.com>))

1. Pengalihan aset atau *asset transmutation*, lembaga keuangan mampu melakukan pengalihan bentuk dari kewajiban menjadi aset.
2. Likuiditas (*liquidity*) berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan menyediakan uang tunai pada saat dibutuhkan, baik oleh pemilik dana (*ultimate lenders*) maupun oleh pihak yang membutuhkan dana (*ultimate borrowers*).
3. Realokasi pendapatan (*income reallocation*), lembaga keuangan membantu masyarakat baik secara individu maupun badan usaha untuk dapat menyisihkan dan merealisasikan pendapatan sekarang guna menghadapi berbagai kemungkinan pada masa yang akan datang.
4. Transaksi (*transaction*) lembaga keuangan memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter dalam perekonomian.
5. Efisiensi (*efficiency*), lembaga keuangan dapat mendorong penurunan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas karena lembaga keuangan

merupakan media pertemuan unit surplus dana dengan unit defisit dana secara tidak langsung, serta dapat menekan terjadinya *moral hazard* dan *misrepresentation*.

Jika peran intermediasi dapat dilakukan dengan baik maka lembaga keuangan akan dapat mendorong terwujudnya nilai tambah dalam perekonomian, demikian juga halnya dengan Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan layanan keuangan pada masyarakat berpendapatan rendah dengan skala usaha ekonomi yang masih sangat terbatas. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro akan mendorong kelompok masyarakat ini menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.

Menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia diharapkan akan dapat menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro juga diharapkan meningkatkan *financial inclusion*, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap jasa layanan keuangan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat komunal atau gotong royong amat sesuai dengan ciri dari Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan sebuah *community bank*.

2.2.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara konseptual Pemberdayaan atau pemerkuasaan berasal dari kata (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan (Edi Suharto, 2005: 57). Dengan artian yaitu memberikan atau mengalihkan kekuasaan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam membangun diri dan lingkungan

dengan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan atau program pembangunan yang dapat memberikan kemampuan kepada masyarakat.

Pemberdayaan adalah “membantu” suatu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kualitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan komunitas itu sendiri. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadi, yang artinya perlu melalui tahapan-tahapan sebagai proses perkembangan menuju perbaikan. Proses tersebut memerlukan partisipasi penuh dari komunitas dalam kurun waktu yang relatif lama. Sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan yaitu: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Asril, 2013: 129). Tujuan dari pemberdayaan sendiri menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemudian istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”. Artinya tata kelola rumah tangga, tata kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah “ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga.(Asril, 2013: 129)

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Mengidentifikasi kebutuhan, menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang ada agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Atau pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat upah/gaji yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

2.2.7 Strategi Pemberdayaan

Strategi adalah suatu proses sekaligus produk yang penting untuk penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan agar tercapainya tujuan. Menurut Stephanie K. Marrus (dalam Umar, 2005: 31). Menurut Sumodiningrat, menyatakan bahwa strategi pemberdayaan pada dasarnya memiliki tiga arah yaitu: *pertama*, pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi melalui perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan struktur politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

2.2.8 Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan

Terlepas dari macetnya kredit yang disalurkan, Lembaga Keuangan Mikro dalam banyak hal telah turut berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Gina dan Effendi (2015), pembiayaan mikro berperan untuk mengurangi sejumlah

faktor yang menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat miskin dapat memulai untuk menghasilkan pendapatan. Pembiayaan dapat memutus masalah UMKM yang menyebabkan pelaku usaha mikro berpendapatan rendah.

Selanjutnya, data kementrian KUKM (2009) menyebut lebih dari 26,4 juta unit usaha mikro dan kecil di tahun 2008. Mereka bergerak di sektor primer seperti pertanian, perikanan dan perkebunan. Jika asumsi kasar untuk UMKM ini rata-rata membutuhkan satu juta hingga lima juta rupiah untuk modal usaha, maka akan ada permintaan untuk pembiayaan sekitar Rp. 26 triliun hingga 132 triliun.

Meski biaya proses pinjaman dari Lembaga Keuangan Mikro lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga bank konvensional, namun dari sisi mekanisme peminjaman, Lembaga Keuangan Mikro memiliki beberapa kelebihan diantaranya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Hal ini karena mekanisme peminjaman menggunakan sistem *channelling*. Bahkan ada beberapa Lembaga Keuangan Mikro, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelolanya.

Kelebihan lainnya adalah tata cara pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan *cash flow* peminjam. Dengan kondisi tersebut, Lembaga Keuangan Mikro dalam banyak hal dapat berperan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan terutama di perdesaan. Hal ini didukung pernyataan Ashari (2006):

- 1) Lembaga Keuangan Mikro umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang sebagian besar petani.

- 2) Masyarakat dipedesaan lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
- 3) Karakteristik usaha umumnya membutuhkan plafon kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial Lembaga Keuangan Mikro.
- 4) Dekatnya lokasi Lembaga Keuangan Mikro dan petani memungkinkan pengelola Lembaga Keuangan Mikro memahami karakteristik usaha sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah dan,
- 5) Adanya hubungan sosial-budaya serta hubungan yang bersifat personal secara emosional sehingga dapat diharapkan mengurangi sifat curang dalam pengembalian kredit.

2.2.8.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan proses kesadaran dan partisipasi penuh dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan. Proses tersebut guna mengenali permasalahan yang dihadapi untuk menuju keadaan yang lebih baik serta menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan bersama (Jurnal: Rubiyannah, Minarsih, dan Hasiolan, 2016).

Pemberdayaan adalah “membantu” suatu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kualitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan komunitas itu sendiri. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadi, yang artinya perlu melalui tahapan-tahapan sebagai proses perkembangan menuju perbaikan. Proses tersebut memerlukan partisipasi penuh dari komunitas dalam kurun waktu yang relatif lama. Sebagai

proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan yaitu: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Asril, 2013: 129).

Tahap selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat mandiri yang berkelanjutan. Mandiri merupakan langkah yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Mandiri mengandung arti usaha dalam memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri tanpa bergantung orang lain. Dalam mewujudkan masyarakat mandiri hendaknya mengembangkan potensi dan kapasitas yang ada serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas. Pemandirian masyarakat ini perlu diajak meluaskan jejaring komunikasi agar dapat menambah wawasan seiring perkembangan zaman untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

2.2.9 Lembaga Keuangan Mikro dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMK di Pedesaan

Usaha Mikro dan Kecil menjadi basis perekonomian pedesaan. Karakteristik UMK di pedesaan sebagian besar dicirikan dengan kegiatan usaha di sektor pertanian. Pengelolaan kegiatan ekonomi pedesaan secara umum dan produksi pertanian secara khusus, dihadapkan pada kenyataan bahwa proses transformasi dari input menjadi output (proses produksi) berlangsung dalam jangka waktu lama. Hasil produksi dan penjualan tidak menentu, terjadi volatilitas pasar komoditas pertanian. Kemampuan pengelolaan usaha pertanian dan rumah tangga pedesaan masih terbatas, belum banyak inovasi. Pelaku UMK masih terus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan input dan pemasaran. Ketika UMK di pedesaan ingin mengembangkan usahanya, permasalahan pembiayaan atau permodalan selalu muncul. Keterbatasan layanan pembiayaan/permodalan menyebabkan rumah tangga pedesaan terjebak pada

layanan jasa pinjaman dengan bunga tinggi. Perbankan komersial sulit membiayai UMK karena masalah persyaratan bank teknis, seperti: catatan administrasi keuangan, laporan keuangan dan jaminan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro sangat dibutuhkan karena memberikan fleksibilitas persyaratan dan pembayaran yang lebih baik dibandingkan bank komersial. Lembaga Keuangan Mikro berperan membantu pelayanan jasa keuangan pada masyarakat pedesaan. Ketersediaan layanan pembiayaan di pedesaan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan usahanya.

Lembaga Keuangan Mikro sedikitnya memiliki tiga peran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan:

1. Sebagai lembaga perantara keuangan di pedesaan,
2. Sebagai lembaga perantara sosial di pedesaan, dan
3. Sebagai agen pembangunan ekonomi pedesaan.

Sebagai lembaga perantara keuangan, Lembaga Keuangan Mikro memperbesar akses pelayanan jasa keuangan pada masyarakat desa. Masyarakat bisa memanfaatkan jasa Lembaga Keuangan Mikro untuk menyimpan uangnya dan mengajukan pembiayaan untuk peningkatan usahanya. Sebagai lembaga perantara sosial, Lembaga Keuangan Mikro melakukan pembinaan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat. Sebagai agen pembangunan ekonomi pedesaan, Lembaga Keuangan Mikro berperan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pedesaan berputar di wilayah tersebut. Berbeda dengan bank komersial, penghimpunan dan penyaluran dana bisa banyak berbeda. Bank komersial

menghimpun dana masyarakat pedesaan untuk disalurkan ke masyarakat perkotaan. Lembaga Keuangan Mikro juga berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi dan menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk dan upaya pengentasan kemiskinan.

2.2.10 Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdapat Di Indonesia Saat Ini

Baskara (2013), mengatakan melihat sejarah panjang keuangan mikro tersebut, tidak mengherankan jika terdapat banyak jenis Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Pelayanan keuangan mikro tidak hanya didominasi oleh lembaga namun juga banyak jenis layanan dan bantuan berupa subsidi yang diluncurkan oleh pemerintah. Hampir setiap pergantian pemerintahan meluncurkan program yang berbeda kepada masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya program, aturan dan juga kewenangan lembaga yang bergerak di bidang keuangan mikro, dan akhirnya bermuara pada susahnyanya mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program yang ada. Keadaan ini juga menyebabkan Lembaga Keuangan Mikro baik yang berbasis desa maupun yang terdapat di perkotaan untuk bisa menjalankan usaha mereka secara berkesinambungan, dalam arti tingkat keberlangsungan hidup Lembaga Keuangan Mikro menjadi rendah.

Baskara (2013), mengatakan persaingan yang ketat serta tumpang tindihnya kebijakan membuat banyak Lembaga Keuangan Mikro yang tidak mampu bersaing,

sehingga harus menghentikan usahanya atau hanya tinggal nama. Sebagai gambaran di sebuah desa di Propinsi Bali, bisa terdapat lebih dari lima hingga tujuh jenis Lembaga Keuangan Mikro maupun bank yang menasar segmen mikro, diantaranya Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh masyarakat, BPR, Teras BRI (Unit mikro BRI), dan Danamon Simpan Pinjam (DSP). Segmen pasar yang terbatas membuat tiap LKM harus mampu bersaing, hal yang tentunya amat sulit bagi LKM konvensional jika harus dihadapkan dengan lembaga modern seperti bank umum dan BPR. Partisipan keuangan mikro di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama adalah lembaga atau institusi formal dan non-formal, kelompok kedua merupakan program keuangan mikro baik yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga- lembaga donor dalam dan luar negeri. Ketiga adalah partisipan individu yang biasanya informal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjalankan usahanya secara ilegal, dalam kelompok ini termasuk para pemburu rente seperti rentenir, ijon, gadai ilegal, kelompok arisan, dan lain lain.

2.2.11 Membangun Lembaga Keuangan Mikro yang Sehat dan Kuat

Keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan desakan kebutuhan telah menjadi pendorong utama semakin banyaknya masyarakat yang berusaha mandiri, hal ini tentunya akan membuka lapangan kerja baru, pendapatan penduduk akan meningkat, daya belinya juga meningkat, sehingga tingkat perekonomian masyarakat yang bersangkutan juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan usahanya Lembaga Keuangan Mikro masih menghadapi permasalahan yang pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara masalah yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi ini tentunya akan berakibat pada keterbatasan jangkauan pelayanan Lembaga Keuangan Mikro terhadap usaha mikro yang seharusnya dapat menjangkau secara luas, sehingga pengembangan usaha dan peningkatan investasi bagi usaha mikro dan kecil.

Upaya yang dilakukan untuk memperkuat Lembaga Keuangan Mikro agar menjadi lembaga keuangan yang sehat dan kuat di antaranya adalah:

- 1) Perkuatan permodalan dan manajemen
- 2) Penggalangan dukungan dan fasilitas pembiayaan UMKM dengan Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) Penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam rangka penguatan Lembaga Keuangan Mikro *Academics Bussiness & Government (ABG)*. Masyarakat baik yang dalam maupun luar negeri.
- 4) Optimalisasi pendayagunaan potensi sumber dana pembiayaan di daerah (Bagian laba BUMN, Dana Bergulir, Yayasan, Bantuan Luar Negeri).
- 5) Training bagi pengelola Lembaga Keuangan Mikro, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola Lembaga Keuangan Mikro.

- 6) Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit Lembaga Keuangan Mikro dan tabungan nasabah Lembaga Keuangan Mikro.
- 7) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro harus didasarkan pada azas demokrasi ekonomi, esentralisasi, kemandirian, undiscriminative, dan perlindungan bagi *stakeholder* yang berkepentingan. Prinsip yang perlu diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*), yang mencakup aspek-aspek: Kelembagaan, Pendanaan, Pelayanan. Disamping itu masalah internal yang harus dibenahi adalah masalah efisiensi, keterbatasan SDM dan teknologi.

2.2.12 Masyarakat

Masyarakat mempunyai arti sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. masyarakat disini memiliki semangat juang yang tinggi untuk menghadapi tantangan hidup di masa lalu maupun ingin mengisi kehidupan di masa yang akan datang dengan berbagai hal yang lebih menguntungkan dengan meyakini berwirausaha merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian keluarga. (Setiawan dimas. 2012. (<http://defenisimu.blogspot.com>))

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk meneliti mengenai peranan lembaga keuangan mikro pada tingkat perekonomian masyarakat adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Mulyana,2008:151).Dalam penelitian kualitatif ini yang akan diteliti adalah mengenai peranan lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Juli. Di pilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai perkembangan ekonomi di Kelurahan Ndorurea Kecamatan Nangapanda dari sebelum adanya Lembaga Keuangan Mikro dengan sesudah adanya Lembaga Keuangan Mikro.

3.3 Data Dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto, (2013: 172) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung,yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Data primer adalah sumber data

yang dimana sebuah data dihasilkan dari hasil wawancara serta data hasil observasi masyarakat-masyarakat yang bersangkutan mengenai keuangan di Kecamatan Nangapanda. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikan daftar pertanyaan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui daftar pertanyaan oleh informan yaitu adalah masyarakat kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda yang memperoleh pinjaman dan pembiayaan usaha berskala mikro di Unit Keuangan Mikro Kecamatan Nangapanda. pertanyaan yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan masyarakat tentang pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro di Kecamatan Nangapanda.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut sugiyono, (2013: 137) data sekunder adalah data yang diperoleh dari inventaris literature-literatur yang ada dan berbagai sumber yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku literatur, website internet, diktat diktat kuliah, majalah-majalah, jurnal jurnal yang berhubungan dengan pokok penelitian, selain itu data tersebut juga didapatkan dari kantor lurah dan kantor Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) yang terdiri dari data tentang topografi, data keuangannya, proses penyaluran keuangan dan kondisi sosial masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam

penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.4.1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri khas yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lainnya. Menurut Suharsimi Arikunto, (2010: 199) menyatakan bahwa observasi yang disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap masyarakat yang memperoleh pinjaman dan kegiatan penyalaluran di Unit Pengembangan Kecamatan (UPK).

3.4.2. Wawancara

Selain melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Kedua teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan bersamaan, dimana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi (Djaelani, 2013: 87). Sugiyono (dalam Esterberg (2002: 233), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015: 231). Pada penelitian ini dilakukan interview pada dua sumber yaitu pihak dari Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) Kecamatan Nangapanda dan Masyarakat yang memperoleh dana, agar mendapatkan jawaban yang lebih meyakinkan pada penelitian ini.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2009: 240). Dalam penelitian ini akan dicantumkan berupa dokumentasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro yang diteliti, gambar hasil wawancara, dan tabel-tabel tentang data jumlah anggota yang melakukan pinjaman di Unit Pengembangan Kecamatan (UPK) Kecamatan Nangapanda.

3.5 Tahap Analisis Data

Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

3.5.1. Reduksi data (*data reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.5.2. Penyajian data (*data display*).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah uraian yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

3.5.3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang. Verifikasi dilakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori feminisme liberal. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya telah diketahui, dicek kembali agar data yang telah diverifikasi menjadi lebih baik. Hasil dari verifikasi tersebut digunakan sebagai data penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua.